



BPKPAD
Kab. Bantul



2026 PERJANJIAN KINERJA

BPKPAD BANTUL

☎ (0274) 368548

✉ bpkpad@bantulkab.go.id

🌐 www.bpkpad.bantulkab.go.id



LAMPIRAN 1
TABEL KINERJA
TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Jabatan : Kepala Badan
Tahun Anggaran : 2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	Indeks	75,36	I	75,36
					II	75,36
					III	75,36
					IV	75,36*
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Persen	0,91- 0,97	I	0,91- 0,97
					II	0,91- 0,97
					III	0,91- 0,97
					IV	0,91-0,97
1.1	Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Persen	95,32	I	95,32
					II	95,32
					III	95,32
					IV	95,32
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	25,11	I	25,11
					II	25,11
					III	25,11
					IV	25,11
		Persentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	83,00	I	83,00
					II	83,00
					III	83,00
					IV	83,00

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	: Rp. 72.586.000
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	: Rp. 319.960.393.702
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	: Rp. 1.686.943.500
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	: Rp. 11.339.745.400
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	: Rp. 83.613.178.936
	Jumlah Anggaran	: Rp. 416.672.847.538

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.

NIP. 197503251996032003

LAMPIRAN II

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2026

Uraian Tujuan :

“Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel”
Dalam pemenuhan target tujuan perangkat daerah ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), tetapi juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dimana BPKPAD bertugas sebagai pengelolaan keuangan yang handal, transparan, dan akuntabel sehingga terwujudnya Laporan Keuangan dan Aset Daerah sehingga dapat menghasilkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja

Tujuan kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi tujuan kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	suatu laporan pengelolaan keuangan yang handal transparan dan akuntabel terjadi apabila dalam suatu penilaian yang dilakukan oleh Struktur Organisasi di atasnya menunjukkan pengukuran tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu menghasilkan indeks yang terbaik	Penilaian atas 6 Dimensi IPKD 1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 4. Penyerapan anggaran 5. Kondisi keuangan daerah 6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD	Keputusan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Rasio ini menunjukkan seberapa besar daya dukung ekonomi daerah dalam menghasilkan penerimaan pajak daerah, serta seberapa efektif sistem perpajakan daerah dalam mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah.	Penerimaan Pajak Daerah dibagi PDRB ADHB dikali 100%	Data statistic BPS periode sebelumnya

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun N-1	75,36	<p>Bobot Penilaian atas 6 Dimensi IPKD</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 15%2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD 20%3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 15%4. Penyerapan anggaran 20%5. Kondisi keuangan daerah 15%6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD 15% <p>Dengan diketahuinya bobot penilaian setiap dimensinya memberikan gambaran Kepada BPKPD dapat melakukan optimalisasi pada dimensi yang mana atas hasil tahun sebelumnya</p> <p>Dari hasil pengukuran tahun 2023 adalah 72,193 dengan dimensi ke 6 sudah memperoleh nilai maksimal, sedangkan untuk dimensi yang lain masih kurang. Dari hasil pengukuran tahun 2024, Kabupaten Bantul memperoleh indeks 75,1391 predikat Perlu Perbaikan. Adapun nilai tiap Dimensi adalah :</p> <p>Dimensi 1 : 10,448 Dimensi 2 : 15 Dimensi 3 : 15 Dimensi 4 : 15 Dimensi 5 : 4,6913 Dimensi 6 : 15</p> <p>Masih menggunakan capaian tahun 2024, dikarenakan capaian tahun 2025 belum rilis.</p>
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,91- 0,97	Target tersebut disesuaikan dengan target provinsi DIY, akan tetapi yang bisa dilakukan oleh BPKPAD guna meningkatkan rasio tersebut dengan melakukan optimalisasi pajak daerah

Uraian Sasaran :

“Meningkatnya pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah”

Dalam pemenuhan target sasaran ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak hanya berperan sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), tetapi juga berperan sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Dimana BPKPAD tidak hanya bertugas sebagai pengelolaan keuangan yang handal, transparan, dan akuntabel, tetapi juga sebagai koordinator pengelolaan pendapatan

daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- PMK Nomor : 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah; dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Prosentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	Untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan yang relevan, transparan dan akuntabel, tercermin pada pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran belanja yang tepat waktu, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesulitan dalam pelaporannya. Untuk itu kinerja ini dapat dilihat dari realisasi belanja dibandingkan dengan pagu anggaran yang ditetapkan	prosentase realisasi belanja terhadap anggaran kali 100%	Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahunan
2	Prosentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Dalam pengelolaan aset daerah diperlukan adanya ketepatan serta ketelitian dalam melakukan pengelolannya, sehingga perlunya ada rekonsiliasi pertahapan atas pengelolaan aset barang milik daerah	prosentase jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah tepat waktu dan sesuai regulasi dibagi jumlah OPD kali 100%	Laporan Rekonsiliasi Aset
3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Suatu Daerah dikatakan mandiri apabila daerah tersebut dapat mengelola secara maksimal atas potensi kekayaan yang dimilikinya guna memperoleh Pendapatan Daerah yang sebanyak banyaknya dalam melakukan pengembangan suatu daerahnya tanpa harus menunggu dana tranfer atau bantuan dana dari pemerintah pusat. Hal ini lah yang mendasari Kabupaten Bantul berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak banyaknya	Perentase relaisasi PAD dibagi Pendapatan Daerah dikali 100%	Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahunan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Prosentase pengelolaan keuangan yang sesuai peraturan yang berlaku	95,32 Persen	Hasil prosentase realisasi belanja terhadap pagu anggaran BPKPAD tahun 2024 diperoleh sebesar 95,21 persen. Hal ini memperlihatkan dalam proses penganggaran tepat waktu, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tidak terdapat kendala berarti dalam melakukan kegiatan. Untuk itu pada tahun tahun berikutnya dituntut untuk melakukan optimalisasi dari perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan sampai dengan pelaporan keuangan. Masih menggunakan capaian tahun 2024 karena tahun 2025 data masih <i>unaudited</i> .
Prosentase akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah	83,00 Persen	Dalam ketugasan sebagai PPKD Kabupaten Bantul, BPKPAD memiliki tugas dalam melakukan koordinasi, pemantauan, serta evaluasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga diharapkan pada tahun tahun berikutnya dalam hal pengelolaan barang milik daerah lebih tertata, tertib, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kegiatan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah ini dilakukan secara bertahap, guna menghasilkan pelaporan aset yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan pada Laporan Pertanggung jawaban Daerah
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	25,11 Persen	Hasil perbandingan realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar 24,47 Persen. Dengan peningkatan persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah maka akan semakin banyak sumber pendanaan mandiri yang dapat diusahakan oleh Kabupaten Bantul guna Pembangunan Daerah. Masih menggunakan capaian tahun 2024 karena tahun 2025 data masih <i>unaudited</i> .

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Pelaksana Tugas Seketaris
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Angka	82,73	I	-
					II	-
					III	82,73
					IV	-
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	83,4	I	-
					II	-
					III	-
					IV	83,4
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Cash Managemen : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp 83.613.178.936,00
B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	:	Rp 318.573.555.199,00
Jumlah Anggaran	:	Rp 402.186.734.135,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH



ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA
NIP. 19750325 199603 2 003

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS



R. SURANA NUGRAHA, S.E
NIP. 19690329 199303 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

ꦒꦺꦴꦧꦺꦤ꧀ꦤꦺꦤꦶꦁꦲꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦧ
Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711
Email : bpkpad@bantulkab.go.id Website <http://www.bpkpad.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNIK PRASTIWI YUDIARI, S.E
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : R. SURANA NUGRAHA, S.E
Jabatan : Pelaksana Tugas Sekretaris
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS


R. SURANA NUGRAHA, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET


UNIK PRASTIWI YUDIARI, S.E.
NIP. 179721207 199503 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	143	I	143
					II	143
					III	143
					IV	143
2	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	Laporan	34	I	7
					II	7
					III	10
					IV	10
3	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan	90	I	20
					II	20
					III	20
					IV	30
4	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1
5	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan	75	I	75
					II	75
					III	75
					IV	75

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	:	Rp	34.741.855.712,00
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	:	Rp	34.330.915.712,00
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	:	Rp	410.940.000,00
B. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	:	Rp	318.573.555.199,00
1) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	:	Rp	276.302.294.030,00
2) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	:	Rp	5.000.000.000,00
3) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	:	Rp	37.271.261.169,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	353.315.410.911,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS



R. SURANA NUGRAHA, S.E
NIP. 19690329 199303 1 004

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
ASET



UNIK PRASTIWI YUDIARI, S.E.
NIP. 179721207 199503 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10	I	2
					II	2
					III	2
					IV	4
2	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5	I	1
					II	1
					III	2
					IV	1
3	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	30	I	7
					II	8
					III	7
					IV	8
4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	17	I	4
					II	4
					III	4
					IV	5
5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	I	1
					II	1
					III	1
					IV	2
6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	160	I	35
					II	35
					III	40
					IV	50
8	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	7	I	1
					II	1
					III	1
					IV	3
9	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1
10	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
12	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
13	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
14	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	104	I	25
					II	25
					III	25
					IV	29

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	120	I	30
					II	30
					III	30
					IV	30

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah : Rp 7.125.000,00
 - 1) Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian : Rp 7.125.000,00
 - B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah : Rp 1.336.869.974,00
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor : Rp 617.100,00
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor : Rp 340.037.954,00
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga : Rp 22.117.920,00
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan : Rp 61.264.500,00
 - 5) Subkegiatan Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan : Rp 9.000.000,00
 - 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD : Rp 834.988.000,00
 - 7) Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD : Rp 1.494.500,00
 - 8) Subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD : Rp 67.350.000,00
 - C. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Rp 100.650.000,00
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya : Rp 100.650.000,00
 - D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah : Rp 46.592.158.000,00
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Rp 7.848.000,00
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : Rp 46.352.700.000,00
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor : Rp 231.610.000,00
 - E. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Rp 826.257.750,00
 - 1) Subkegiatan Pemeliharaan dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan : Rp 746.607.750,00
 - 2) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya : Rp 79.650.000,00

Jumlah Anggaran : Rp 48.863.060.724,00


*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS



R. SURANA NUGRAHA, S.E
NIP. 19690329 199303 1 004

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



ADAM SUGIYANTO, S.E
NIP. 19750902 199803 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Perencana Ahli Muda
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	I	1
					II	1
					III	2
					IV	2
2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp	8.262.500,00
1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	: Rp	6.350.000,00
2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	: Rp	1.912.500,00
Jumlah Anggaran	: Rp	8.262.500,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS



R. SURANA NUGRAHA, S.E
NIP. 19690329 199303 1 004

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
PERENCANA AHLI MUDA



RIDZKYA DHENTA MAHASEBA, S.H
NIP. 19860909 201001 1 012

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas	Persentase Pengelolaan Keuangan Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	97,20	I	-
					II	-
					III	-
					IV	97,20
2	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	Persen	35	I	-
					II	-
					III	-
					IV	35

Keterangan :

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	: Rp	72.586.000,00
B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	: Rp	304.462.000,00
Jumlah Anggaran	: Rp	377.048.000,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
 PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN



ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP., MPA.
 NIP. 197503251996032003



RAMIYANA, S.I.P., M.M.
 NIP. 19680208 199203 1 008

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Daerah
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	7	I	1
					II	1
					III	1
					IV	4
2	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	I	1
					II	-
					III	-
					IV	-
3	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	140	I	-
					II	-
					III	140
					IV	-

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	:	Rp	217.750.000,00
1) Subkegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	:	Rp	134.225.000,00
2) Subkegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	:	Rp	5.175.000,00
3) Subkegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	:	Rp	78.350.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	217.750.000,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*


Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG BELANJA DAERAH



RAMIYANA, S.I.P., M.M.
NIP. 19680208 199203 1 008



JONET ROHMANYU, S.E., M.S.E
NIP. 19690616 199402 1 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se- DIY	Laporan	3	I	1
					II	1
					III	1
					IV	-
2	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	198	I	49
					II	49
					III	49
					IV	51
3	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	88	I	22
					II	22
					III	22
					IV	22
4	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen	42	I	10
					II	10
					III	10
					IV	12

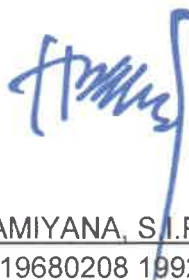
Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A.	Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	:	Rp	72.586.000,00
1)	Subkegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	:	Rp	72.586.000,00
		:	Rp	
B.	Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	:	Rp	86.712.000,00
1)	Subkegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	:	Rp	78.977.000,00
2)	Subkegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	:	Rp	3.750.000,00
3)	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas	:	Rp	3.985.000,00
	Jumlah Anggaran	:	Rp	159.298.000,00

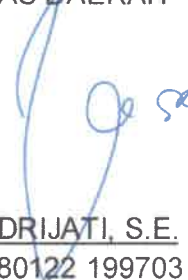
*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN



RAMIYANA, S.I.P., M.M.
NIP. 19680208 199203 1 008

Bantul , 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN
KAS DAERAH



INDRIJATI, S.E.
NIP. 19680122 199703 2 003

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	Persen	7	I	-
					II	-
					III	-
					IV	7*

Keterangan :

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp 531.834.300,00

Jumlah Anggaran : Rp 531.834.300,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.
NIP. 19750325 199603 2 003

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG AKUNTANSI

NURHIDAYATI, S.E
NIP. 19700306 199503 2 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembukuan
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	2	I	-
					II	-
					III	1
					IV	1
2	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	31	I	-
					II	-
					III	15
					IV	16
3	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	70	I	-
					II	-
					III	-
					IV	70

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	:	Rp	64.010.000,00
1) Subkegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	:	Rp	24.485.000,00
2) Subkegiatan Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	:	Rp	36.550.000,00
3) Subkegiatan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Kabupaten/ Kota	:	Rp	2.975.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	64.010.000,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG AKUNTANSI



NURHIDAYATI, S.E
NIP. 19700306 199503 2 002

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN



DIAS RAHMAWAN, S.E
NIP. 19820801 201001 1 018

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	648	I	162
					II	162
					III	162
					IV	162
2	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	I	-
					II	2
					III	-
					IV	-
3	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1
4	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	:	Rp	467.824.300,00
1) Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	:	Rp	36.517.500,00
2) Subkegiatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	:	Rp	422.721.800,00
3) Subkegiatan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	:	Rp	4.335.000,00
4) Subkegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	:	Rp	4.250.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	467.824.300,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG AKUNTANSI



NURHIDAYATI, S.E.
NIP. 19700306 199503 2 002

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PENGOLAHAN
DATA DAN LAPORAN



TUTIK WINARTI, S.E.
NIP. 197301261996032001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦩꦠꦶꦏꦏꦁꦏꦺꦒꦺꦭꦺꦭꦏꦏꦺꦒꦸꦁꦤ꧀ꦥꦺꦤ꧀ꦝꦺꦥꦠꦤ꧀ꦢꦤꦲꦱꦺꦠꦺꦢꦂꦫꦃ

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email : bpkpad@bantulkab.go.id Website <http://www.bpkpad.bantulkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. SURANA NUGRAHA, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Daerah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH


ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.
NIP. 197503251996032003

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG ANGGARAN


R. SURANA NUGRAHA, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Presentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Presen	30	I	-
					II	-
					III	-
					IV	30

Keterangan :

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :
 - Program Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp 550.542.203,00

Jumlah Anggaran : Rp 550.542.203,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



ISTRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA.
NIP. 197503251996032003

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG ANGGARAN



R. SURANA NUGRAHA, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran

Tahun Anggaran : 2026


No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	396	I	95
					II	93
					III	92
					IV	116
2	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1
3	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	452	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :
- A. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran : Rp 32.749.900,00
Daerah
 - 1) Subkegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi : Rp 31.354.900,00
DPA-SKPD
 - 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi : Rp 1.395.000,00
serta Kebijakan Bidang Anggaran
 - B. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan : Rp 5.880.103,00
Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian : Rp 5.880.103,00
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- Jumlah Anggaran : Rp 38.630.003,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG ANGGARAN


R. SURANA MUGRAHA, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN
ANGGARAN


ITA YUANITA DIMYATI, S.E.
NIP. 19800410 201001 2 015

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	1
					IV	-
2	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	1
					IV	-
3	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2
4	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	I	-
					II	-
					III	-
					IV	2


Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

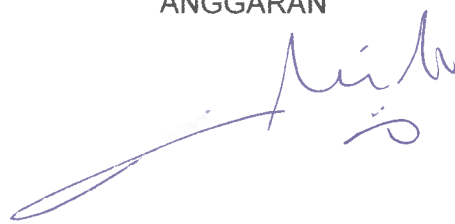
A. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	: Rp	511.912.200,00
1) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	: Rp	59.400.100,00
2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rp	59.700.100,00
3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	: Rp	221.550.000,00
4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	: Rp	171.262.000,00
Jumlah Anggaran	: Rp	511.912.200,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG ANGGARAN


R. SURANA MUGRAHA, S.E.
NIP. 19690329 199303 1 004

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
ANGGARAN


MUH. LATIF, S.IP., M.A.P
NIP. 19770804 199803 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas tata kelola barang milik daerah	Persentase Akurasi Data Barang Milik Daerah dalam Rangka Assets Management	Persen	66	I	-
					II	-
					III	-
					IV	66

Keterangan :

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :


A Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	: Rp	1.686.943.500,00
Jumlah Anggaran	: Rp	1.686.943.500,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
 DAERAH


ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA
 NIP. 19750325 199603 2 003

Bantul, 7 Januari 2026
 PIHAK KEDUA
 KEPALA BIDANG ASET


JUGO NOOR SUBARKAH, S.E., M.Si.
 NIP. 19730826 199903 1 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan
 Pengendalian Barang Milik Daerah
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	52	I	13
					II	13
					III	13
					IV	13
2	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	4	I	-
					II	2
					III	2
					IV	-
3	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1.622	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1622
4	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1	I	-
					II	1
					III	-
					IV	-
5	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	11	I	-
					II	5
					III	-

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					IV	6
6	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan	16	I	4
					II	4
					III	4
					IV	4

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	:	Rp	1.203.912.500,00
1)	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	:	Rp	337.550.000,00
2)	Subkegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah	:	Rp	10.250.000,00
3)	Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	:	Rp	337.250.000,00
4)	Subkegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	:	Rp	4.484.500,00
5)	Subkegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	:	Rp	160.919.000,00
6)	Subkegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	:	Rp	353.459.000,00
	Jumlah Anggaran	:	Rp	1.203.912.500,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG ASET



JUGO NOOR SUBARCAH, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN,
PENGHAPUSAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK DAERAH



SITI NURYANI, S.E.
NIP. 19700217 199503 2 001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Optimalisasi BMD
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	1
					IV	-
2	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	120	I	-
					II	120
					III	-
					IV	-
3	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1	I	-
					II	-
					III	-
					IV	1
4	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	240	I	-
					II	-
					III	240
					IV	-

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	:	Rp	483.031.000,00
1) Subkegiatan Penyusunan Standar Harga	:	Rp	305.300.000,00
2) Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	:	Rp	7.535.000,00
3) Subkegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	:	Rp	97.611.000,00
4) Subkegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	:	Rp	72.585.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	483.031.000,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG ASET



JUGO NOOR SUBARCAH, S.E., M.Si.
NIP. 19730826 199903 1 005

Bantul, 2 Januari 2026
PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN
DAN OPTIMALISASI BARANG MILIK
DAERAH



SETIO ADI SARWOKO, S.Kom.
NIP. 19810830 200903 1 003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan
Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	10,79	I	-
					II	-
					III	-
					IV	10,79

Keterangan :

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :
 - A Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : Rp 5.925.430.000,00
 - Jumlah Anggaran : Rp 5.925.430.000,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH



ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA
NIP. 19750325 199603 2 003

Bantul, 7 Januari 2026
PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
PENETAPAN



ANGGIT NUR HIDAYAT, S.H., M.A.P.
NIP. 19780918 199803 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	7	I	7
					II	7
					III	7
					IV	7
2	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	:	Rp	1.398.128.100,00
1) Subkegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	:	Rp	1.293.623.100,00
2) Subkegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	:	Rp	104.505.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	1.398.128.100,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
PENETAPAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN DAN
INFORMASI PAJAK DAERAH



ANGGIT NUR HIDAYAT, S.H., M.A.P.
NIP. 19780918 199803 1 004



SRI AMBARWATI, S.E
NIP. 19701005 199203 2 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
2	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	3	I	-
					II	-
					III	-
					IV	3
3	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	30	I	-
					II	15
					III	-
					IV	15
4	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	:	Rp	4.527.301.900,00
1) Subkegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	:	Rp	1.809.189.000,00
2) Subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	:	Rp	1.008.976.500,00
3) Subkegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	:	Rp	246.806.500,00
4) Subkegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	:	Rp	1.462.329.900,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	4.527.301.900,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 2 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
PENETAPAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN
PENETAPAN PAJAK DAERAH

ANGGIT NUR HIDAYAT, S.H., M.A.P.
NIP. 19780918 199803 1 004

SELVIRA MUTIYA, S.E
NIP. 19760810 200604 2 007

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Pesentase data piutang pajak daerah yang tertagih	Persen	78,50	I	-
					II	-
					III	-
					IV	78,5

Keterangan :

- Untuk mencapai Sasaran Program sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	:	Rp	5.414.315.400,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	5.414.315.400,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

PIHAK KEDUA
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
 DAERAH


ISTIRUL WIDILASTUTI, S.IP, MPA
 NIP. 19750325 199603 2 003

Bantul , 7 Januari 2026
 PIHAK PERTAMA
 KEPALA BIDANG PENAGIHAN,
 PENGEMBANGAN DAN PEMERIKSAAN


DARMAWAN PURWANA, S.E.
 NIP. 19751114 200604 1 004

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tersedianya Hasil Analisis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
2	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	4	I	1
					II	1
					III	1
					IV	1
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	10	I	2
					II	2
					III	2
					IV	4
4	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
5	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	12	I	-
					II	-
					III	-
					IV	12

Keterangan :

1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

A Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	:	Rp	5.152.865.400,00
1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	:	Rp	2.463.587.500,00
2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	:	Rp	519.815.000,00
3) Penyediaan Sarana dan Prasarana	:	Rp	1.046.505.000,00
4) Penagihan Pajak Daerah	:	Rp	1.049.557.900,00
5) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	:	Rp	73.400.000,00

Jumlah Anggaran : Rp 5.152.865.400,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENAGIHAN,
PENGEMBANGAN DAN PEMERIKSAAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN
PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH



DARMAWAN PURWANA, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004



HERWINA DIAN APRILIA, S.E., M.A
NIP. 19830410 201001 2 025

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan
 Pendapatan Daerah
 Tahun Anggaran : 2026

No	Sasaran Kinerja/Rencana Hasil Kerja	Indikator Subkegiatan	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3
2	Terlaksannanya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daaerah	Dokumen	12	I	3
					II	3
					III	3
					IV	3

Keterangan :

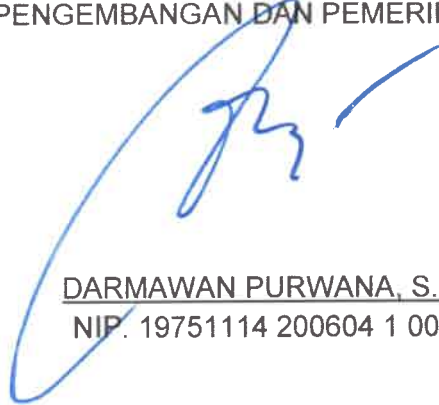
1. Untuk mencapai Sasaran Subkegiatan sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

A Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	:	Rp	261.450.000,00
1) Subkegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	:	Rp	44.550.000,00
2) Subkegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	:	Rp	216.900.000,00
Jumlah Anggaran	:	Rp	261.450.000,00

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

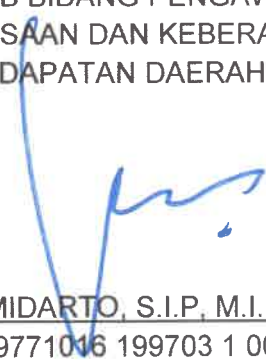
Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA BIDANG PENAGIHAN,
PENGEMBANGAN DAN PEMERIKSAAN



DARMAWAN PURWANA, S.E.
NIP. 19751114 200604 1 004

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN,
PEMERIKSAAN DAN KEBERATAN
PENDAPATAN DAERAH



HARMIDARTO, S.I.P, M.I.P
NIP. 19771016 199703 1 001